

**SKRIPSI**

**Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui  
Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kabupaten  
Sumbawa Barat Tahun 2018  
(Study Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong)**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH :**

**Mario Del Rosario**  
**NIM.216130054**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN FUNGSI AGEN DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DAERAH  
PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG (PDPGR) DI KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2018**

(Studi Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong)



**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi  
Mataram, 14 Agustus 2020

**Dosen Pembimbing I**

**Drs. Amil, M.M**  
NIDN. 0831126204

**Dosen Pembimbing II**

**Yudhi Lestana, S.IP., M.IP.**  
NIDN. 0827118801

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI

Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  
Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di  
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018  
(Study Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong)



Disusun dan diajukan Oleh

**MARIO DEL ROSARIO**  
NIM. 216130054

PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 18 Agustus 2020 dan  
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

1. **Drs. H. Amil, M.M** (PU) (.....)  
NIDN. 0831126204
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP** (PP) (.....)  
NIDN. 0827118801
3. **Dedy Iswanto, S.T., M.M** (PN) (.....)  
NIDN. 0818087901

Mengetahui,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan

  
**Drs. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIO DEL ROSARIO

NIM : 216130054

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020

  
MARIO DEL ROSARIO  
NIM. 216130054



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mario Del Rosario  
NIM : 216130054  
Tempat/Tgl Lahir : Telaga Baru 20 Desember 1996  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 081238954061  
Judul Penelitian : -

Deteksi Fungsi Agri Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat  
Melalui Program Daerah Pembinaan Gedung Royong (P.D.P.R)  
Di Kabupaten Lombok Barat. Tahun 2018 (Skripsi dan Kertas Ketersahan  
Telaga Batang).

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.** *MD*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 04 - 04 - 2020

Penulis



Mario Del Rosario  
NIM. 216130054

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
MDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'rid Del Rosari D.  
 NIM : 216130054  
 Tempat/Tgl Lahir : Telaga Baru 30 Desember 1996  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Fakultas : Fisipol  
 No. Hp/Email : 081 238 954 861  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pelaksanaan fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PPGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Telaga Bontong)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 09-09-2020

Penulis



Ma'rid Del Rosari D.  
 NIM. 216130054

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya

(Mario/Penulis)

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuasaya **Bapak Mustaram** dan **Ibu Suryani** yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terbaik selama penyusunan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada keluarga besarsaya yang selalu memberikan semangat dan menghibur disaat lelah dengan dunia skripsi.
3. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
4. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016 - 2020.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 (Study Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong)** dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Amil, M.M selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Mustaram dan Ibu Suryani. Terima Kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah bapak/ibu lakukan dan perjuangkan untuk saya.

6. Untuk Erna Sukmawati selaku seorang terspesial yang tersetia menemani dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terima kasih telah memberikan semangat yang tiada hentinya.
7. Untuk Rusalim Ramadhan, Anwar dan Khairurrosikin selaku sahabat rasa keluarga, yang selalu memberikan keceriaan dan berbagi dalam suka maupun duka untuk sama-sama memperjuangkan skripsi ini.
8. Semua teman-teman Studi Pemerintahan Kelas B angkatan 2016 atas kerja samanya.
9. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram, Agustus 2020

Mario Del Rosario

**Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui  
Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kabupaten  
Sumbawa Barat Tahun 2018**

**(Study Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong)**

**Mario Del Rosario**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah proses perbaikan pola pikir (kognitif), sikap mental (afektif) dan pola tindak (psikomotorik) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan. Sedangkan pengertian Program Pemberdayaan Gotong Royong atau yang disingkat dengan PDPGR dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, program daerah pemberdayaan gotong royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Ada dua pokok permasalahan yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan fungsi agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat dan Apakah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. PDPGR Kelurahan Telaga Bertong dalam menjalankan fungsinya dengan cara menjalankan segala kegiatan PDPGR seperti Jambanisasi, Bariri Tani, Bariri Disabilitas, UMKN, RTLH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Telaga Bertong.

The Functions of Agent Performance to Improve Community Participation through  
the Regional Mutual Assistance Empowerment Program (PDPGR)  
in West Sumbawa Regency in 2018

(Case Study at Telaga Bertong Village)

Mario Del Rosario

**ABSTRACT**

Article 1 of the Regional Regulation of West Sumbawa Regency Number 3 of 2016 related to the Regional Program for Mutual Empowerment, discusses that empowerment is a process of improving human/community resources, including the mindset (cognitive), mental attitude (effective), and patterns of action (psychomotor), both individually or in groups, in various life activities to enhance the people welfare. Meanwhile, Mutual Cooperation Empowerment Program is abbreviated as PDPGR in Article 1 of West Sumbawa Regency Regulation Number 3 of 2016 defined as the regional cooperation empowerment program in the provision of space and the affirmation of the direction of strengthening mutual cooperation as a value and means of achieving objectives which are applied in a manner voluntarily, togetherness and helping each other based on the spirit of sincerity, honesty and kindness in realizing development, community empowerment and expanding employment opportunities effectively and efficiently for poverty alleviation acceleration. There are two main problems are: How is the function of the agent in increasing community participation through the local cooperation empowerment program (PDPGR) in West Sumbawa Regency, and What are the factors that affect community participation through the regional mutual empowerment program (PDPGR) in West Sumbawa Regency. This study used a descriptive qualitative method. The data collection techniques were obtained via interviews, observation, and documentation. Primary data and secondary data were the sources of data. PDPGR of Telaga Bertong Village carrying out its function to all PDPGR activities such as building the public toilet, Bariri Tani, Bariri Disability, UMKN, RTLH as an attempt to alleviate poverty in Telaga Bertong Village.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM  
KEPALA  
UPT PSB  
UNIVERSITAS AN-NABAWIYAH MATARAM  
Hudaib, M.Pd  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

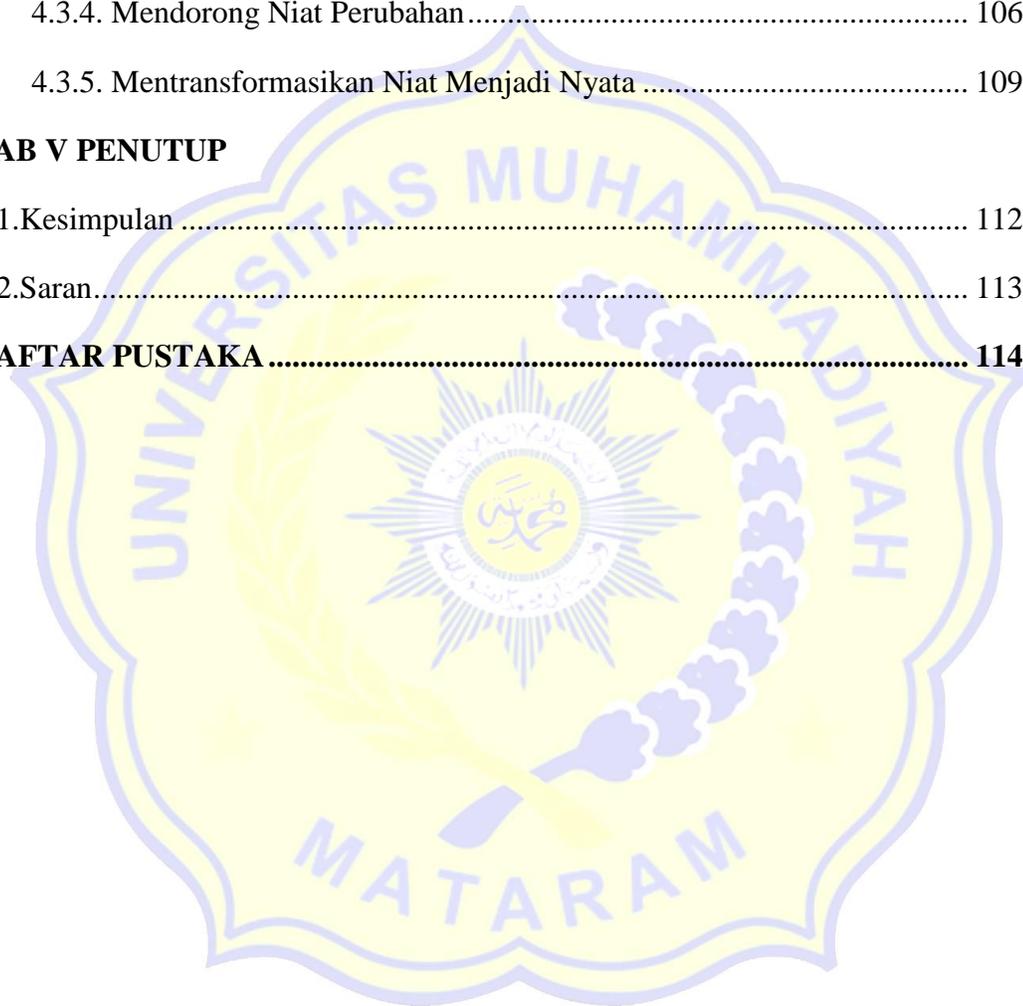
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Akademik.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis .....	10
1.4.3. Manfaat Teoritis .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Tinjauan Teori .....	20
2.2.1. Fungsi Agen .....	20
2.2.2. Definisi Partisipasi .....	22
2.2.2.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	25
2.2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi.....	25
2.2.2.3. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi.....	27
2.2.2.4. Partisipasi Masyarakat .....	29
2.2.3. Masyarakat .....	31
2.2.4. Definisi Pemberdayaan .....	32
2.2.5. Gotong Royong .....	34
2.3. Kerangka Berpikir .....	35
2.4. Definisi Konseptual.....	36
2.5. Definisi Operasional.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	39
3.2.2. Waktu Penelitian .....	40
3.3. Informan Penelitian.....	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1. Wawancara atau <i>Interview</i> .....	41

3.4.2. Observasi.....	41
3.4.3. Dokumentasi .....	42
3.5. Sumber Data.....	42
3.5.1. Sumber Data Primer.....	43
3.5.2. Sumber Data Sekunder .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Kelurahan Telaga Bertong .....	45
4.1.1. Gambaran Umum Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.....	48
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	48
4.2. Aspek – Aspek Pemberdayaan Masyarakat .....	52
4.2.1. Kesejahteraan.....	52
4.2.1.1. Peningkatan Kualitas Hidup.....	57
4.2.1.2. Ketercukupan .....	59
4.2.2. Akses .....	62
4.2.2.1. Ketersediaan Sumber Daya .....	67
4.2.2.2. Manfaat dan Hasil Sumber Daya .....	69
4.2.3. Partisipasi.....	75
4.2.3.1. Masyarakat Terhadap Pengambilan Keputusan .....	76
4.2.4. Kontrol.....	79
4.2.4.1. Pengendalian Oleh Pemerintah .....	82
4.2.4.2. Pengendalian Oleh Masyarakat.....	91

4.3. Fungsi Agen .....	92
4.3.1. Membangun Kesadaran Pentingnya Perubahan .....	92
4.3.2. Media Penukaran Informasi.....	99
4.3.3. Mengidentifikasi Masalah .....	101
4.3.4. Mendorong Niat Perubahan.....	106
4.3.5. Mentransformasikan Niat Menjadi Nyata .....	109
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	112
5.2. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>



## DAFTAR TABEL

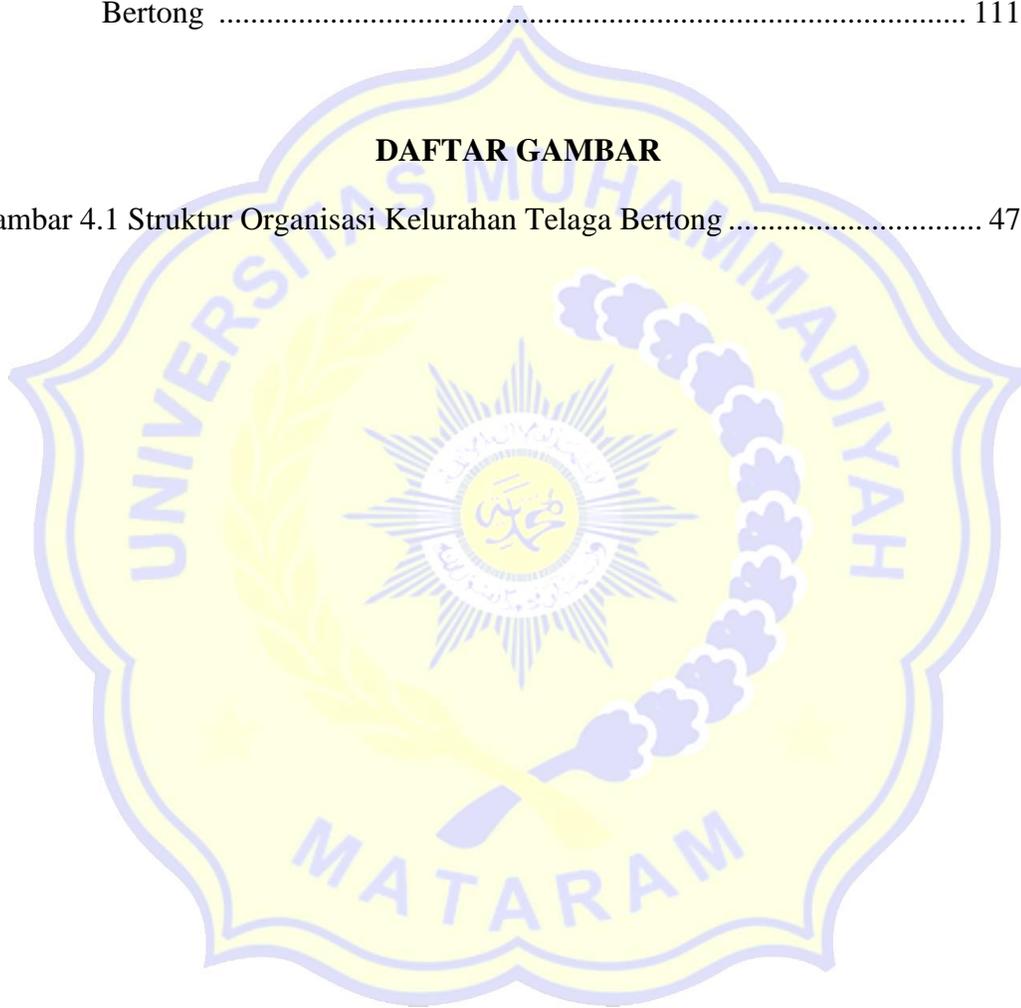
Tabel 4.1 Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Telaga Bertong Tahun 2017 dan 2018 .....	53
Tabel 4.2 Jumlah Sasaran Kegiatan PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat 2018.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Penerimaan Bantuan PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong Tahun 2018.....	56
Tabel 4.4 Jenis Bantuan Kartu Bariri Tani Tahun 2018 .....	58
Tabel 4.5 Jumlah Penerima Kegiatan Pembangunan Jamban/ lingkungan di Kelurahan Telaga Bertong Tahun 2018 .....	61
Tabel 4.6 Agen Kelurahan Telaga Bertong.....	63
Tabel 4.7 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Telaga Garden Tahun 2018.....	64
Tabel 4.8 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Telaga Tahun 2018 .....	64
Tabel 4.9 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Kokar Dalam Tahun 2018.....	64
Tabel 4.10 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Reboya Tahun 2018.....	65
Tabel 4.11 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Ina Membe Tahun 2018.....	65

Tabel 4.12 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Perjuk Tahun 2018.....	65
Tabel 4.13 Agen Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Balat Tahun 2018.....	66
Tabel 4.14 Tim Penggerak PDPGR Kelurahan Telaga Bertong tahun 2018.....	67
Tabel 4.15 Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Telaga Bertong.....	69
Tabel 4.16 Potensi Sumber Daya Alam Kelurahan Telaga Bertong.....	71
Tabel 4.17 Hasil Verifikasi Bedah Rumah dan Rencana Anggaran Biaya Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.....	73
Tabel 4.18 Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Modal Usaha Mikro Program Bariri UMKM Peliuk Kelurahan Telaga Bertong Lingkungan Telaga Garden Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018.....	74
Tabel 4.19 Rehab rumah tidak layak huni .....	75
Tabel 4.20 Jadwal Laporan Agen Pemberdayaan PDPGR Tahun 2018.....	80
Tabel 4.21 Pengendalian Penerapan Fungsi PDPGR Tahun 2018 .....	83
Tabel 4.22 Sasaran Kegiatan-Kegiatan PDPGR .....	85
Tabel 4.23 Kelembagaan PDPGR.....	87
Tabel 4.24 Pendidikan Masyarakat Kelurahan Telaga Bertong .....	95
Tabel 4.25 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kelurahan Telaga Bertong 2018 .....	96
Tabel 4.26 Sasaran Kegiatan-Kegiatan PDPGR.....	99
Tabel 4.27 Etnis Masyarakat Telaga Bertong .....	102
Tabel 4.28 Usia Masyarakat Kelurahan Telaga Bertong.....	104

Tabel 4.29 Kriteria Atau Persyaratan Penerima Bantuan Jaminan Sosial Pariri Tahun 2018.....	107
Tabel 4.30 Sosialisasi Ketersediaan Anggaran PDPGR Tahun 2018.....	109
Tabel 4.31 Time Schedule Kegiatan Agen PDPGR Kelurahan Telaga Bertong .....	111

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Telaga Bertong .....	47
---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi negara kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negara kesejahteraan. Problematika yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah adalah adanya perbedaan besar dan kurangnya koordinasi dari peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Pengertian dan makna otonomi daerah telah mengalami pergeseran mendasar sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap banyak memiliki kelemahan. Dalam hal menimbang huruf C, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, di sebutkan bahwa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu di ganti dan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Busrizalti, 2013:64).

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (stimulan) merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi kemudian menjelma menjadi daerah otonom. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan (Widjaja, 2011:23).

Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan epublik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut Anwas, 2013:4, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang di sebabkan beberapa faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka di perlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani.

Saat ini, pemerintah terus berupaya membuat suatu kebijakan yang dapat berpengaruh besar terhadap pemberdayaan masyarakat serta sekaligus pengentasan kemiskinan. Baik itu kebijakan langsung yang di buat oleh pemerintah pusat maupun kebijakan yang secara khusus di buat oleh pemerintah daerah yang tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat dan sesuai dengan cita-cita negara. Seperti halnya program-program Nasional yang sudah di laksanakan di Indonesia seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Kompensasi Bahan Bakar Minyak, Program Pengembangan Kecamatan (PKK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program lainnya dengan tujuan yang sama, Semua program yang di buat oleh

pemerintah tertentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan (Edhi, 2007:15).

Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu kabupaten dari 8 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa Besar pada 18 Desember 2003 yang beribu kota di Taliwang. Kabupaten ini memiliki 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan terdiri atas 57 desa. (sumbawabarakab.go.id diakses pada 13 Desember 2019). Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, (2010:99), jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2009 jumlah penduduk tercatat 101.089 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 sebanyak 114.951 jiwa serta data terakhir pada tahun 2017 sebesar 135.031 jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut, tidak menutup kemungkinan berpotensi menyumbangkan berbagai macam permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat Sumbawa Barat, diantaranya seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, politik, dan permasalahan kesejahteraan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat bahwa presentase kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2015 mencapai 16,97 % atau dengan jumlah 22.500 jiwa dan 2016 mencapai 16,50 % atau 22.470 jiwa. Dalam setahun terakhir penurunan angka kemiskinan itu sudah mulai terjadi dengan dimulai beberapa program pro kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sepanjang tahun 2016. (bpssumbawabarakab.go.id diakses pada 13 Desember 2019)

Penurunan angka kemiskinan itu di mulai ketika adanya program daerah yang mengarah kepada upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, lahirlah sebuah gagasan baru dari Pemerintah Daerah kabupaten Sumbawa Barat untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Program pemberdayaan masyarakat ini direalisasikan melalui program PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) yang di resmikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muhammad Zainul Majdi pada kamis 28 April 2016. Pada kesempatan itu pula Bupati Sumbawa Barat Dr.Ir.H.W Musyafirin,M.M, memperkenalkan sekitar 1500 orang agen pemberdayaan gotong royong dari seluruh wilayah Sumbawa Barat yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan sejumlah program berazas gotong royong yang di canangkan oleh pemerintah daerah (sumbawabarakab.go.id diakses pada 13 Desember 2019 jam 19:10 WITA).

Sehingga dengan adanya program baru yaitu Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di harapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap kehidupan masyarakat. PDPGR ini direalisasikan di semua desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas 57 Desa. Untuk mempermudah dan mendukung program ini maka di bentuk agen PDPGR yang pada awal peresmian program terdiri atas 1500 orang agen yang nantinya akan di tempatkan di masing-masing desa. Tentunya hal ini bertujuan agar program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. (sumbawabarakab.go.id. diakses pada 13 Desember 2019 jam 20:20 WITA)

Salah satu kegiatan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini adalah kegiatan jambanisasi se-Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan data yang

telah di himpun agen pemberdayaan gotong royong sebanyak 7.027 rumah yang berhak untuk menerima bantuan pembuatan jamban se-KSB. Namun setelah dilakukannya verifikasi oleh tim penggerak gotong royong tingkat kecamatan, maka pada tahun 2017 jumlah rumah yang mendapat bantuan jambanisasi ini sebanyak 6.164 di semua desa yang ada di KSB. Sementara 863 rumah yang sebelumnya di data setelah diverifikasi ternyata tidak memenuhi kriteria dari sasaran program ini. Menurut asisten II Setda KSB, H. Mashur Yusuf,ST bahwa biaya pembuatan jamban tersebut sebesar RP. 1,5 juta sedangkan khusus untuk pembuatan jamban yang ada di daerah terpencil di tambah biaya transportasi menjadi RP. 2,5 juta seperti desa Mantar, Mataiyang, Rarak, Ronges, dan Telonang . ([sumbawabaratkab.go.id](http://sumbawabaratkab.go.id). diakses pada 17 Desember 2019 jam 18:28 WITA)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemebrdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah proses perbaikan pola pikir (kognitive), sikap mental (afective) dan pola tindak (psicomotoric) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejateraan. Sedangkan pengertian Program Pemberdayaan Gotong Royong atau yang disingkat dengan PDPGR dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, program daerah pemberdayaan gotong royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong

menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Adapun fungsi agen PDPGR menurut UU Nomor 3 Tahun 2016 yaitu sebagai motor penggerak gotong royong.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, dari 7 kelurahan, 57 desa yang ada di Sumbawa Barat, sudah semua kelurahan melaksanakan program ini. Misalnya Kelurahan Telaga Bertong, yang merupakan kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas 28 RT dan 6 Kepala Lingkungan. Di Kelurahan Telaga Bertong ini program PDPGR sudah dikatakan berjalan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kelurahan Telaga Bertong yang menjadi sasaran dari Program PDPGR ini. Katertankan peneliti menentukan wilayah penelitian dengan fokusnya di Kelurahan Telaga Bertong, karena Kelurahan Telaga Bertong merupakan salahsatu jumlah lamban yang sedikit serta jumlah rumah tidak layak huni yangnya yang ada di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ([sumbawabaratkab.go.id](http://sumbawabaratkab.go.id). diakses pada 15 Desember 2019 jam 18:28 WITA).

Terkait dengan diberlakukannya program PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong maka perlu ada koordinasi dari pihak terkait, supaya dalam pelaksanaannya dapat menjangring kelompok sasaran yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Jika melihat realita yang ada di Kelurahan Telaga Bertong kelompok yang medapat bantuan khususnya bedah rumah masih berasal dari lingkaran kekuasaan atau yang mempunyai

hubungan dekat dengan agen PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong. Sehingga perlu di kaji lebih dalam terkait partisipasi masyarakat dan bagaimana pola pemilihan dari kelompok sasaran dalam PDPGR ini serta kriteria yang jelas sebagai persyaratan penerimaan bantuan dari PDPGR ini sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat serta ketidakpercayaan masyarakat kepada agen PDPGR dan program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ([sumbawabarakab.go.id](http://sumbawabarakab.go.id). diakses pada 15 Desember 2019 jam 18:51 WITA).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan meneliti tentang **“Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 (Study Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui pelaksanaan fungsi agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat
2. Ingin mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat di gunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

##### **1.4.1. Manfaat Akademik**

Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini melalui program PDPGR.
- b. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang pentingnya partisipasinya dalam meningkatkan pembangunan daerah.

##### **1.4.3. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian program-program pemerintah daerah PDPGR.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbanguan/perkembangan daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan, Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama.* Penelitian yang dilakukan oleh Susiana dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Terhadap Pengetasan Kemiskinan Studi Kasus Di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2017. Hasil Penelitian Secara umum implementasi PDPGR di desa Kelanir mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR dari tahun 2016-2017, namun dalam pelaksanaanya di pengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di desa Kelaner tidak bejalan optimal di karenakan tidak ada sosialisasi progam kepada masyarakat, rendahnya kualitas agen pemberdayaan PDPGR desa Kelaner sebagai ujung tombak

keberhasilan program serta tidak adanya SOP sejak tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan program

*Kedua.* Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Elya Safitri dengan judul Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat). Hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong telah terlaksana namun masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun dari berbagai informan mengatakan bahwa pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini sudah baik, akan tetapi belum mampu mengajak masyarakatnya menjadi puas akan program tersebut, dimana masih banyak masyarakat yang mengeluh karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dari program tersebut.

*Ketiga.* Penelitian yang dilakukan oleh Lia Okta Ayu NPB dengan judul Relevansi Pemahaman dan Sikap Pemuda Terhadap Nilai Gotong Royong Untung Pembangunan Di Desa Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian, Faktor yang mempengaruhi pemuda memiliki sikap pemahan yang tinggi tetapi tidak melaksanakan nilai-nilai di dalamnya karena pemuda memilih untuk bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga dari pada untuk mengikuti kegiatan gotong royong. Faktor lain yang menyebabkan yaitu karena pemuda malas dan merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Pemuda pun ada yang berfikir bahwa kegiatan gotong royong tersebut tidak memiliki sangki yang tegas. Kesimpulan dari penelitian

ini bahwa tidak relevan antara pemahaman dan sikap pemuda terhadap nilai gotong royong untuk pembangunan di Desa Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

*Keempat.* Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Agus Setiawan dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Bali Dalam Kegiatan Gotong Royong (Studi Kampung Sakti Buana Seputih Banyak Lampung Tengah). Hasil Penelitian, Pada tahap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Sakti Buana, mayoritas masyarakat Bali ikut terlibat dalam tahap ini. Hal ini terlihat dari presentase dari masyarakat Bali yang hadir dalam kegiatan rapat untuk pembuatan perencanaan pembangunan di kampung yakni sebesar 80%. Dalam kegiatan rapat tersebut, masyarakat yang berpartisipasi menyumbangkan ide pemikirannya untuk rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Sakti Buana. Adapun bentuk ide pemikiran yang disumbangkan oleh masyarakat Bali di Kampung Sakti Buana antara lain berupa konsep pembangunan, penentuan anggaran dana pembangunan, pembangunan dilakukan di seluruh dusun, dan pembangunan infrastruktur.

*Kelima.* Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Putra yang berjudul Analisis Kegiatan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Pembangunan Gampong Alue Raya Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Hasil Penelitian, Keberadaan Gotong royong di Gampong Alue Raya dapat dilihat dari beberapa aktifitas keseharian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan dengan bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan. ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dari segi pertanian saling bantu membantu menggarap lahan pertanian, di segi sosial lainnya

seperti acara-acara adat yang diselenggarakan dalam Gampong juga pembangunan bangunan fisik dalam Gampong



No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Critical Point
1	Susiana	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Terhadap Pengetasan Kemiskinan Studi Kasus Di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2017	Metode deskriptif kualitatif	Secara umum implementasi PDPGR di desa Kelanir mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR dari tahun 2016-2017, namun dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di desa Kelanir tidak berjalan optimal di karenakan tidak ada sosialisasi progam kepada masyarakat, rendahnya kualitas agen pemberdayaan PDPGR desa Kelanir sebagai ujung tombak keberhasilan program serta tidak adanya SOP sejak tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diharapkan pemerintah harus mampu menjalankan kepemimpinan sesuai dengan demikian akan terjalannya komunikasi dan kerjasama dalam pengimplementasian PDPGR tersebut.</li> </ul>

2	Elsa Elya Safiti	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat)	Metode deskriptif	<p>Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong telah terlaksana namun masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun dari berbagai informan mengatakan bahwa pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini sudah baik, akan tetapi belum mampu mengajak masyarakatnya menjadi puas akan program tersebut, dimana masih banyak masyarakat yang mengeluh karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang belum mendapatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena sering terjadi kesalahpahaman dari masyarakat kepada pemerintah, maka sebaiknya pemerintah daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>memberikan komunikasi kembali kepada masyarakat setempat khususnya masyarakat desa dengan lebih sering melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang hukum dan program PDPGR, agar kesalahpahaman tidak terjadi antara masyarakat dan pemerintah</li> </ul> </li> </ul>
---	------------------	---	-------------------	---	--

				<p>pelayanan dari program tersebut.</p>	
3	<p>Lia Okta Ayu NPB</p>	<p>Relevansi Pemahaman dan Sikap Pemuda Terhadap Nilai Gotong Royong Untuk Pembangunan Di Desa Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat</p>	<p>Metode deskriptif</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi pemuda memiliki sikap pemahan yang tinggi tetapi tidak melaksanakan nilai-nilai di dalamnya karena pemuda memilih untuk bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga dari pada untuk mengikuti kegiatan gotong royong.</p> <p>Faktor lain yang menyebabkan yaitu karena pemuda malas dan merasa itu buktanggung jawab mereka. Pemuda pun ada yang berfikir bahwa kegiatan gotongroyong</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat Semarang Jaya diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, agar menjadi contoh yang baik bagi pemuda serta masyarakat</li> </ul>

				<p>tersebut tidak memiliki sangki yang tegas.</p> <p>Kesimpulan dari penelitian inibahwa tidak relevan antara pemahaman dan sikap pemudaterhadap nilai gotongroyong untuk pembangunan di Desa semarang Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.</p>	
4	I Wayan Agus Setiawan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Etnis Bali Dalam Kegiatan Gotong Royong (Studi Kampung Sakti Buana Seputih Banyak Lampung Tengah)	Metode deskriptif	<p>Pada tahap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Sakti Buana, mayoritas masyarakat Bali ikut terlibat dalam tahap ini. Hal ini terlihat dari presentase dari masyarakat Bali yang hadir dalam kegiatan rapat untuk pembuatan perencanaan pembangunan di kampung yakni sebesar 80%. Dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sudah cukup baik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Akan tetapi terdapat masyarakat yang tidak berpartisipasi secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan dengan tidak ikut terlibat dalam proses pembangunan tersebut baik secara langsung</li> </ul>

			<p>kegiatan rapat tersebut, masyarakat yang berpartisipasi menyumbangkan ide pemikirannya untuk rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Sakti Buana. Adapun bentuk ide pemikiran yang disumbangkan oleh masyarakat Bali di Kampung Sakti Buana antara lain berupa konsep pembangunan,</p> <p>penentuan anggaran dana pembangunan, pembangunan dilakukan di seluruh dusun, dan pembangunan infrastruktur.</p>	<p>maupun tidak langsung. Hal tersebut tentu saja akan dapat menyebabkan pembangunan terhambat, atau proses penyelesaiannya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.</p>
--	--	--	--	--

5	Agustina Putra	Analisis Kegiatan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Pembangunan Gampong Alue Raya Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat	Metode deskriptif	<p>Keberadaan Gotong royong di Gampong Alue Raya dapat dilihat dari beberapa aktifitas keseharian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan dengan bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan. ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dari segi pertanian saling bantu membantu menggarap lahan pertanian, di segi sosial lainnya seperti acara-acara adat yang diselenggarakan dalam Gampong juga pembangunan bangunan fisik dalam Gampong.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di harapkan perhatian pemerintah maupun pihak terkait lainnya dalam memupuk serta membina semangat gotong royong yang juga merupakan falsafah Negara agar tidak terkikis oleh arus modernisasi yang semua mengedepankan materi.</li> </ul>
---	----------------	---	-------------------	--	---

## 2.2. Tinjauan Teori

### 2.2.1. Fungsi Agen

Menurut Nasution (2004:31) Menurut agen (perubahan) adalah orang yang menghubungkan antara sumber perubahan baik itu inovasi maupun kebijakan organisasi dengan target perubahan. Untuk itu ada sejumlah peran *agent of change* yang harus dilaksanakan sebagai *Change Leader*.

Selain menginformasikan hal baru dalam rangka memperkenalkan suatu Inovasi/ Kebijakan baru kepada suatu kelompok target perubahan, agen perubahan juga memiliki peran/fungsi penting dalam:

1. Membangun kesadaran pentingnya perubahan

Agen Perubahan harus mampu menyadarkan target bahwa mereka memerlukan perubahan dengan sikap/perilaku yang sebaiknya mereka lakukan. Perubahan sikap itu akan memberikan kemudahan/keuntungan bagi mereka dan diharapkan pada tahap ini target perubahan mempunyai kesadaran bahwa untuk hal yang lebih baik mereka harus berubah demi mereka sendiri.

2. Media penukar informasi

Ketika kelompok masyarakat target perubahan menyadari bahwa mereka memerlukan perubahan, maka Agen Perubahan secara terus menerus membangun komunikasi dengan mereka. Mereka harus dapat diterima serta dipercaya oleh kelompok sosial / masyarakat target Inovasi / Kebijakan Publik sebelum mau membangun hubungan baik. Ia harus membangun citra diri sehingga dipersepsikan bahwa dia orang yang kompeten (*competence*), kredibel

(*credible*), dapat dipercaya (*trustworthy*) dan bersikap penuh simpati dan empati pada kelompok sosial/masyarakat target Inovasi/Kebijakan Publik.

3. Mengidentifikasi masalah

Agen Perubahan bertanggung jawab menyajikan hasil analisis tentang apa yang terjadi dan tidak dapat terpenuhi kebutuhannya saat itu. Pada saat yang demikian Agen Perubahan diharapkan mampu melihat persoalan yang dihadapi dengan menggunakan perspektif organisasi dan menyajikan komunikasi yang efektif.

4. Mendorong niat perubahan

Setelah Agen Perubahan menjelaskan berbagai cara harus dilakukan oleh target perubahan mereka, maka Agen Perubahan dituntut untuk mampu memberi motivasi yang telah ditawarkan Agen Perubahan.

5. Mentransformasikan niat menjadi nyata

Agen Perubahan dituntut mencari tahu tentang cara bagaimana mempengaruhi target perubahan sebagaimana rekomendasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. Pada tahap ini komunikasi interpersonal antar mereka sendiri dapat membantu meyakinkan untuk memutuskan mengadopsi budaya yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

6. Merawat adopsi values baru dan mencegah pembatalan adopsi

Agen Perubahan diharapkan tetap mendampingi target perubahan agar tetap bertahan dengan sikap perilaku yang sudah diputuskan dengan mengadopsi Values Baru/ Inovasi / Kebijakan Publik. Pendampingan merupakan tahap

penting, karena menjadi konfirmasi tentang perubahan budaya yang dibutuhkan dan sekaligus menunjukkan manfaatnya bagi mereka.

#### 7. Menciptakan Agen Perubahan baru dari Target Perubahan

Akhirnya, Agen Perubahan mendorong target perubahan mampu bersikap dan berperilaku dengan mengadopsi budaya organisasi telah diperkenalkan sebelumnya.

Saat Agen Perubahan setelah mampu mendorong budaya baru maka komunitas organisasi seharusnya telah mampu menciptakan kader Agen Perubahan (baru) dari komunitas target perubahan itu sendiri. Apabila kelompok Komunitas target perubahan telah mampu menghasilkan Agen Perubahan (baru) maka tugas Agen Perubahan telah berakhir

#### **2.2.2. Definisi Partisipasi**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat

keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63)

membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam

pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

#### **2.2.2.1. Bentuk - Bentuk Partisipasi**

Bentuk partisipasi menurut Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

**2.2.2.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Menurut (Ross, 2007: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

### 3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

### 4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

### 5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

### **2.2.2.3. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi**

Mardikanto, 2003 membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan dalam aktifitas partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.
2. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar) meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat (jika tidak berpartisipasi khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya).
4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang

telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Secara konseptual partisipasi merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Pendapat lain tentang partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Nugraheni, 2011 bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalahmasalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu atau warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak lain merupakan peningkatan mutu dari gotongroyong tradisional yang berdasarkan spontanitas dan kesukarelaan kepada suatu usaha perencanaan yang memerlukan perumusan tujuan, penentuan langkah-langkah, dan cara kerja untuk mencapai tujuan.

#### **2.2.2.4. Partisipasi Masyarakat**

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikut sertaanseseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Dr.Made Pidarta, partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orangdalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosiserta fisik dalam

menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Siti Irene, 2011:50).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu Kencana, 2002:132).

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17). Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bias dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat

materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan. (Josef Riwu, 2007:127).

### **2.2.3. Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Soerjono Soekanto 2006: 22, memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk

kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Soerjono Soekanto, 2006: 22 masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Soerjono Soekanto, 2006: 22 adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

#### **2.2.4. Definisi Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya Depdiknas (2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama Koentjaraningrat (2009:20). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Menurut Mubarak (2010:34) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006:56).

#### **2.2.5. Gotong Royong**

Menurut Koenjaraningrat (2009:56) mengemukakan gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris. Gotong royong merupakan suatu sistem

pengarahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktifitas produksi bercocok tanam.

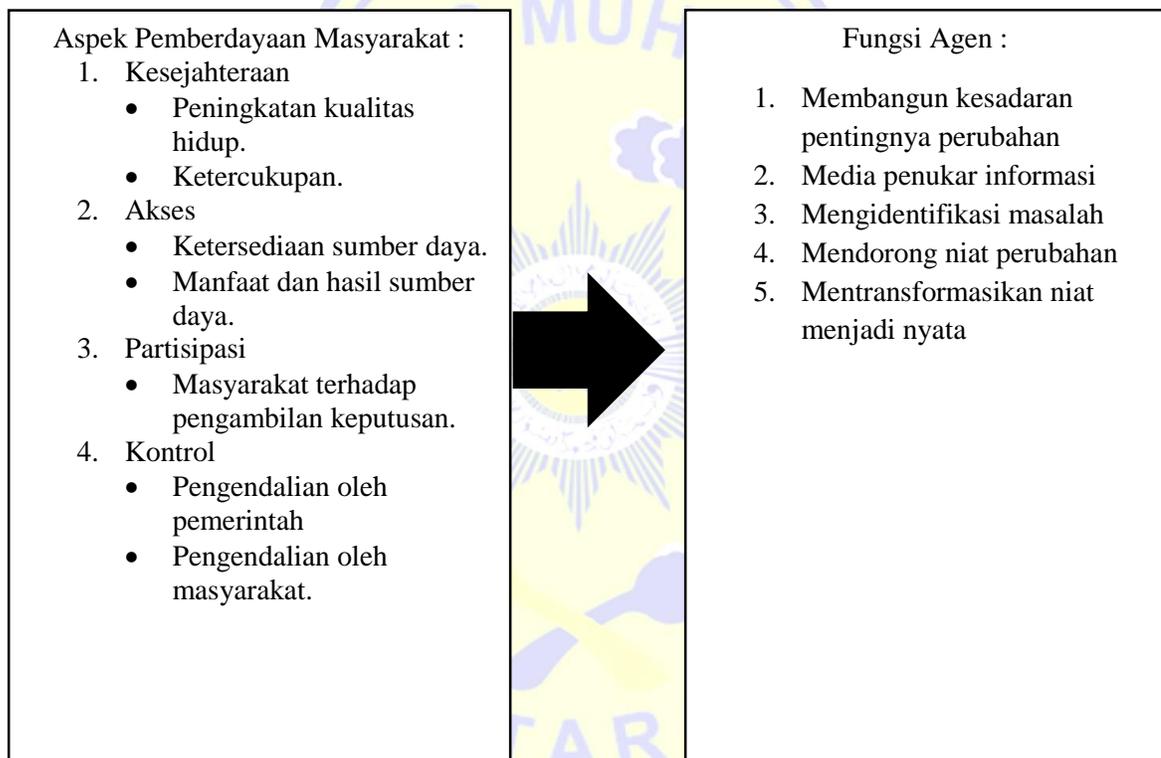
Adapun manfaat gotong royong menurut **Koenjaraningrat (2009:57)** adalah :

1. Agar lingkungan kita dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya
2. Dapat terjalinnya rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat
3. Supaya kehidupan bermasyarakat itu lebih baik dengan diadakannya gotong-royong
4. Pekerjaan selesai dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya ataupun kas RT/RW, dan jika berupa pembangunan fisik gedung akan sangat menghemat anggaran , karena biaya untuk tenaga kerja berkurang dengan adanya Gotong Royong.
5. Tanpa terasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat, yang pejabat kenal dengan tetangga yang pekerja/buruh, yang pedagang kenal dengan yang bekerja sebagai sopir, yang kaya kenal dengan yang miskin, begitu juga sebaliknya.
6. Keamanan lingkungan semakin terjamin, dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan serta saling kenal diantara warga tentunya jika ada pendatang baru ataupun ada tamu asing yang mencurigakan tentu warga akan cepat mengetahuinya.
7. Ketentraman dan kedamaian, akan diperoleh jika antar sesama warga saling peduli dan saling membantu dengan sesama warga lainnya.

8. Gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga ketika di laksanakan semua akan terasa sama.

### 2.3. Kerangka Berpikir

**Gambar 2.3 Kerangka Berpikir**



*Sumber : Sunyoto Usman (2015), Nasution (2004).*

## 2.4. Definisi Konseptual

Definisi konseptual (Moleong, 2007:29) adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

### a. Partisipasi

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

### b. Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF mengemukakan pendapat bahwa terdapat 4 aspek sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas; (1)kesejahteraan; (2)akses; (3)partisipasi; dan (4)kontrol. Keempat dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis serta saling berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.

## 2.5. Definisi Operasional

Definisi operasional (Moleong, 2007:29) adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan kerangka berpikir peneliti, yaitu :

- a. Aspek – Aspek Pemberdayaan Masyarakat
  1. Kesejahteraan
    - Peningkatan kualitas hidup.
    - Ketercukupan.
  2. Akses
    - Ketersediaan sumber daya.
    - Manfaat dan hasil sumber daya.
  3. Partisipasi
    - Masyarakat terhadap pengambilan keputusan.

4. Kontrol

- Pengendalian oleh pemerintah
- Pengendalian oleh masyarakat.

b. Fungsi Agen

1. Membangun kesadaran pentingnya perubahan
2. Media penukar informasi
3. Mengidentifikasi masalah
4. Mendorong niat perubahan
5. Mentransformasikan niat menjadi nyata



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Jenis Penelitian**

Menurut Moleong (2007: 6) penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis (socio-legal approach). Metode kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Secara sosiologis akan dilakukan penelitian di lapangan dengan cara melihat kenyataan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dianalisis dengan sudut pandang hukum dimana akan diperoleh hasil yang mendukung penelitian penulis.

#### **1.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

##### **1.2.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

### **1.2.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan di Desa Telaga Baru Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penulis memilih waktu penelitian pada bulan Januari 2020.

### **1.3. Informan Penelitian**

Menurut Hamid Patilima (2013:12), informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Agen PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang
8. Kepala Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang
9. Masyarakat Penerima Bantuan Program PDPGR (Sasaran)

### **1.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka yaitu pengumpulan dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan. ”sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain". (Moleong 2010: 157). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### **1.4.1. Wawancara atau Interview**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 2007:186), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya keterangan terkait eksistensi rekomendasi dan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PDPGR.

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interview, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah asisten atau anggota/ agen PDPGR. Teknik pelaksanaan wawancara adalah berencana (berpatokan) terstruktur., yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan terkait dengan pelaksanaan fungsi PDPGR, yang dilaksanakan oleh PDPGR Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **1.4.2. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 2008:62). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu ke agen PDPGR Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.4.3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:82). Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap pelaksanaan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang di implementasikan.

### **1.5. Sumber Data**

Menurut Moleong (2000:114) di dalam penelitian ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1.5.1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer atau utama yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati Moleong (2005:57). Sumber data primer diperoleh dari studi lapangan yaitu

suatu cara memperoleh data yang bersifat primer dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengadakan wawancara dan observasi. Sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui catatan tertulis dalam suatu wawancara yang dilakukan pada Informan.

Menurut Moleong (2002:90) informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Anggota tim dapat memberikan pandangan dari segi orang tentang nilai, sikap, dan kebudayaan yang menjadi latar belakang penelitian.

### **1.5.2. Sumber Data Sekunder**

Menurut Moleong (2006:159) data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer. menyebutkan bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, dan tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data.

Moleong (2006:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan manalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Data sekunder atau data yang tertulis, yang digunakan dalam penelitian dapat berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang PDPGR
- b. Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan PDPGR